



2020

INOVASI PARLEMEN

MENJAWAB TANTANGAN ZAMAN



Mahendra Bungalan, SH
Dr. Dra. Retnowati WD Tuti, M.Si
Editor: Dr. Yunanto, M.Si

**INOVASI PARLEMEN MENJAWAB
TANTANGAN ZAMAN**

Karya :

Mahendra Bungalan, SH

Dr. Retnowati WD Tuti, M.Si

Editor :

Dr. Yunanto, M.Si

**INOVASI PARLEMEN MENJAWAB
TANTANGAN ZAMAN**

Cetakan ke-1, Jakarta 2020
Hak cipta dilindungi Undang-Undang
Hak Penerbitan pada UM Jakarta Press

Penulis :
Mahendra Bungalan, SH
Dr. Retnowati WD Tuti, M.Si

Desain Sampul :
Gusti Rahmad Rizaldy, S.Kom

Pengetikan Naskah :
Devia Andiani, S.AP

Penerbit :
UM Jakarta Press
(Anggota IKAPI)
Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Press
Jl.KH.Ahmad Dahlan, Cirendeui, Ciputat
Tangerang Selatan 15419
Telp : 021-7492862, 7401894



ISBN : 978-602-0798-82-0
No.HKI : -

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan ke Hadirat Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan karunianya, sehingga dapat menyelesaikan buku referensi berjudul Inovasi Parlemen Menjawab Tantangan Zaman. Kehadiran buku Referensi ini kiranya dapat memberikan informasi bagi setiap masyarakat yang membutuhkan sebagai referensi dalam Inovasi Parlemen. Buku ini menghadirkan Inovasi Parlemen Menjawab Tantangan Zaman.

Diucapkan terimakasih kepada Kementerian Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi yang telah memfasilitasi dana Penelitian Tesis Magister dengan Anggaran Tahun 2020 . Demikian pula diucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penelitian dan penyusunan buku ini. Semoga kebaikan dan partisipasinya mendapatkan balasan yang sesuai dari Allah subhanahuwata'ala.

Tak ada gading yang tak retak, maka masukan dari para pembaca sangat dinantikan untuk kesempurnaan buku ini. Akhirnya, mudah-mudahan buku ini bermanfaat dan menjadi amal baik dalam rangka menyampaikan ilmu pengetahuan bagi masyarakat.

Jakarta, Juli 2020

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	3
DAFTAR ISI	4
BAGIAN 1 Pendahuluan.....	5
1.1 Latar Belakang.....	5
1.2 e-Parlemen	20
BAGIAN 2 DPR dan e-Parlemen	22
BAGIAN 3 Tantangan menuju e-Parlemen	29
BAGIAN 4 Dasar Hukum e-Parlemen	31
BAGIAN 5 Inovasi Parlemen Menjawab Tantangan Zaman.....	33
BAGIAN 6 KESIMPULAN.....	44
DAFTAR PUSTAKA.....	46

BAGIAN 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Organisasi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Setjen DPR RI) memiliki peran penting dalam sistem pemerintahan. Hal ini dikarenakan Setjen DPR RI memiliki tanggung jawab untuk mendukung terlaksananya tugas dan fungsi dari DPR RI. Setjen DPR RI adalah pilar demokrasi melalui kedudukannya sebagai unsur penunjang DPR yang akan mendukung bagi proses checks and balances antara DPR RI dengan Pemerintah. Saat ini, Setjen DPR RI memiliki tugas dan fungsi untuk memberikan segala pelayanan kepada anggota mulai dari administrasi, keahlian, dan hal-hal lain yang bersifat teknis. Pengaruh sistem Teknologi Informasi dan komunikasi (TIK) di sektor publik telah membuat beberapa organisasi pemerintah meningkatkan fungsinya sesuai dengan kebutuhan warga dan juga untuk meningkatkan penyampaian layanan, meningkatkan produktivitas, dan efektifitas. TIK merupakan sesuatu hal penting bagi layanan

publik, khususnya lembaga pemerintahan yang mampu meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam memberikan layanannya.

Potensi pemanfaatan teknologi informasi belum sepenuhnya terwujud, lembaga-lembaga pemerintahan masih tertinggal dalam mengembangkan pendekatan digital yang membahas layanan secara lengkap dan diberikan tepat waktu. DPR RI/Parlemen haruslah dapat menjadi lembaga yang terbuka dan dapat diakses dengan menggunakan TIK untuk mengelola dan berbagi pengetahuan dan informasi, mengembangkan keterlibatan publik dalam mengatasi krisis legitimasi atas warga Negara yang merasa tidak pernah diperhatikan, kecewa dengan politik, dan tidak percaya pada kinerja dan perilaku demokratis anggota perwakilan mereka.

Dalam era modern saat ini, tuntutan masyarakat terhadap DPR sebagai lembaga perwakilan sangat tinggi. Sehingga jika dinilai tidak memenuhi ekspektasinya, muncul kondisi

ketidakpercayaan (distrust) dari masyarakat sebagaimana yang berlangsung hingga saat ini.

DPR harus mampu menjawab tantangan zaman dan tuntutan masyarakat tersebut melalui sikap responsif, aspiratif, dan akuntabel yang dibuktikan dengan sikap dan perilaku merakyat, humanis dan tentu dengan kinerjanya terutama dalam melaksanakan 3 (tiga) fungsi utama baik di bidang legislasi, anggaran, maupun pengawasan. Melalui slogan DPR menuju Parlemen Modern yang ditandai oleh 3 (tiga) hal yaitu kemudahan akses bagi masyarakat, penggunaan teknologi informasi, serta peningkatan fungsi representasi, maka harus dilakukan berbagai langkah baik fisik maupun non-fisik sebagai komitmen bersama yang saat ini tertuang dalam rencana Strategis (Renstra) DPR 2015-2019.

Pelaksanaan e-Parlemen di DPR RI saat ini baru sebatas pengadaan barang dan teknologi. Belum seluruh anggota DPR RI dan pegawai di lingkungan DPR RI memahami tujuan dari hadirnya e-Parlemen. Akibatnya, tidak ada rencana strategis yang mengarah kepada hadirnya e-Parlemen yang baik di DPR RI.

Belum ada upaya dari pimpinan DPR RI untuk menjadikan para anggota DPR RI maupun pegawainya menjadi melek e-Parlemen sehingga dapat membantu terciptanya budaya e-Parlemen di dalam DPR RI.

Pemanfaatan media pengaduan masyarakat secara online, sudah cukup banyak dimanfaatkan oleh masyarakat dalam menyampaikan berbagai permasalahan yang dihadapinya kepada DPR RI. Namun demikian penggunaan media pengaduan masyarakat online ini, belum dapat digunakan secara optimal oleh masing-masing AKD untuk menindaklanjuti surat pengaduan masyarakat. Kecepatan masyarakat dalam mengirim pengaduannya kepada DPR RI, belum dapat diimbangi dengan kecepatan masing-masing AKD untuk menindaklanjutinya.

Kehadiran media sosial secara otomatis mengubah pengguna termasuk parlemen terkait dengan model komunikasi yang menyertai dalam penggunaan media itu sendiri. Model komunikasi media sosial yang dua arah, demokratis, mengangkat

kesadaran individu dan orientasi pada individu – mau tidak mau – menarik pimpinan dan anggota parlemen untuk berpartisipasi aktif dalam mengelola akun media sosial parlemen secara kelembagaan.

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah pemahaman terkait berbagai ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia terkait berbagai masalah sensitif tentang pencemaran nama baik misalnya, wajib diketahui oleh para pengelola media sosial parlemen.

Pembentukan peraturan perundang-undangan yang responsive dapat dilakukan oleh pembentuk UU dengan melakukan berbagai cara. Salah satu cara untuk membuat UU yang responsif yaitu setiap pembentukan UU harus disertai dengan partisipasi masyarakat. Hal ini dikarenakan materi muatan dalam sebuah peraturan perundangundangan diarahkan kepada kepentingan masyarakat. Oleh karena itu pembentukan sebuah UU harus melibatkan partisipasi masyarakat.

Seperti contohnya yang terjadi pada UU Desa. Melalui nilai-nilai demokrasi partisipatoris UU Desa, sebenarnya bangsa Indonesia memiliki tambahan

kekuatan bagi penguatan peran politik sipil dalam pembangunan nasional, lokal, dan sub lokal terendah yang di level akar rumput. Nilai-nilai tersebut jelas menjadi kekuatan yang dapat saling bersinergi dengan aras kearifan lokal yang dimiliki selama ini.

Konsep mengenai parlemen modern memang memiliki banyak potensi bagi DPR untuk lebih meningkatkan kinerja. Konsep ini juga mendorong lebih besarnya harapan masyarakat terhadap kinerja lembaga perwakilan rakyat untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat. Meski jelas di dalam tulisan buku ini tergambar banyak juga kendala yang harus dihadapi dan atau belum maksimalnya DPR dalam menjalankan ketiga fungsi yang dimilikinya. Konsep parlemen modern, tidak hanya dicetuskan dan kemudian berhenti tanpa perubahan berarti. Perlu banyak lagi perubahan ke arah kemajuan, agar konsep parlemen modern ini benar-benar dapat dilaksanakan secara maksimal oleh para wakil rakyat dan dapat dirasakan kemanfaatannya secara maksimal pula oleh seluruh masyarakat.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2014-2019, diawal masa tugasnya melalui Pimpinan DPR ingin melakukan perubahan dengan konsep baru yang disebut Parlemen Modern. Fokus utama dari parlemen modern yaitu teknologi informasi, keterbukaan akses informasi dan fungsi representasi. Untuk itu, DPR membuka akses yang seluas-luasnya dengan elemen masyarakat baik langsung maupun melalui teknologi. DPR kini telah didukung teknologi informasi, dari mulai website, Twitter, Facebook, SMS, Majalah dan bulletin serta TV Parlemen.

Argumentasinya, sejak reformasi sistem kehidupan bernegara kita berada dalam sistem politik yang demokratis. Dalam era ini terasa bahwa kompetisi kekuatan politik sangat tinggi, partisipasi publik sangat diperlukan sebagai indikator utama, serta kebebasan sipil dan politik dilindungi. Dalam era ini, faktor kemajuan teknologi dan globalisasi menjadi sangat krusial dalam masyarakat informasi yang kini semakin maju. Kehidupan politik di Indonesia mendapatkan pengaruh yang luar biasa dari perkembangan teknologi. Namun di sisi lain, perlu

diperhatikan kaitan antara kemajuan teknologi dan globalisasi itu dengan kebudayaan bangsa Indonesia. Kultur Indonesia memang merupakan kekuatan atau modal dasar untuk kemajuan dalam politik atau kehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi harus diperhatikan bahwa dalam hal tertentu, beberapa nilai budaya bisa jadi menjadi penghambat atau menjadi tantangan yang harus diperbaiki (dekonstruksi budaya baru dalam berdemokrasi).

Salah satu unsur politik yang perlu mengimbangi diri dengan kemajuan teknologi dan globalisasi itu adalah Parlemen. Dengan kata lain, DPR harus memacu diri untuk dapat menjadi parlemen yang modern, agar dapat semakin optimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya. DPR sebagai parlemen modern, memiliki andil untuk tumbuh dan berkembangnya demokrasi di tanah air. Karena demokrasi sebagai sebuah sistem politik dapat dilihat dari berbagai dimensi. Dalam makna yang demikian ini, menjadi dapat dimengerti mengapa terdapat begitu banyak definisi tentang demokrasi. Dalam pengertian yang paling klasik, demokrasi sekurang-kurangnya

diartikan sebagai “pemerintahan oleh dan untuk rakyat”. Namun dalam perkembangannya harus mendapatkan masukan prinsip perwakilan. Parlemen bukan lembaga negara yang statis. Parlemen berubah mengikuti perubahan yang terjadi “di dalam dan di luar” parlemen.

Anggota parlemen dipilih oleh konstituen. Konstituen masa kini memiliki ekspektasi tinggi terhadap kinerja parlemen/anggota. Konstituen menuntut kemudahan akses informasi, transparansi, akuntabilitas dan efektifitas kerja parlemen/anggota. Oleh karena itu, spirit parlemen modern dapat dikatakan salah satu yang terpentingnya adalah: meningkatkan partisipasi publik, dengan indikator sebagai berikut:

1. Transparansi Informasi dibuka seluasnya
2. Teknologi Komunikasi Digital digunakan optimal
3. Fungsi Representasi dilaksanakan dengan baik

Salah satu wujud parlemen yang terbuka adalah diimplemetasikannya “keterbukaan informasi publik” melalui penggunaan hak publik untuk

memperoleh informasi yang berdasar dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak atas informasi menjadi sangat penting dalam upaya menjadikan proses keterbukaan penyelenggara negara untuk terbuka kepada public sehingga apa yang dilakukan oleh penyelenggara atas kerja-kerja penyelenggaraan negara dapat diterima dan dipertanggungjawabkan kepada publik.

Dengan demikian relevansi antara hak setiap orang untuk memperoleh informasi dan hak peranserta masyarakat dalam pelibatan proses pengambilan keputusan publik tidak bermakna dan tanpa arti jika jaminan keterbukaan informasi publik terjadi distorsi. Sehingga kedua penggunaan hak ini harus senantiasa berjalan seiring guna peningkatan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Untuk mendukung hal ini, teknologi informasi digital memang harus dioptimalkan, dengan dinaungi oleh dasar hukum yang jelas dan komprehensif. Dengan demikian, muaranya nanti adalah terwujudnya fungsi representative DPR yang lebih baik.

DPR telah meluncurkan aplikasi yang menunjang proses aspirasi masyarakat terhadap DPR. Dengan aplikasi ini, aspirasi atau pengaduan bisa dilakukan dan dimonitor dengan mudah secara online. "Masyarakat juga diberikan kemudahan dalam menyampaikan aspirasinya melalui sistem online. Yang terbaru, sekarang sudah ada aplikasi DPR dalam Genggaman Rakyat, DPR Now. Bapak dan Ibu bisa download di smartphone masing-masing," kata Ketua DPR Bambang Soesatyo atau akrab disapa Bamsuet, dalam keterangan tertulis, Rabu (30/5/2018).

Bamsuet menambahkan, dengan aplikasi DPR Now, masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi tidak perlu lagi jauh-jauh datang ke gedung DPR, aspirasi bisa disampaikan dan dimonitor melalui smartphone. Selain itu, masyarakat juga bisa mengakses dan mengikuti seluruh kegiatan DPR.

Sebelumnya, Bamsuet juga menjelaskan, berbagai terobosan telah dilakukan untuk mempermudah laporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN). Misalnya telah dilakukannya kerjasama MoU dengan KPK untuk kemudahan anggota DPR

melaporkan LHKPN, dan MoU dengan Dirjen pajak untuk pelaporan pajak.

"Kita telah buat MoU dengan KPK agar para anggota DPR bisa melaporkan LHKPN. Sedangkan dalam pelaporan pajak, kita juga sudah buat MoU dengan Dirjen Pajak," jelas Bamsoet.

Politisi Partai Golkar ini mengatakan, segala bentuk kreativitas ini dilakukan dalam upaya menghadapi Revolusi Industri 4.0. Menurutnya, semua harus terkoneksi secara online dan serba digital. Dengan kemudahan ini, dirinya mengharapkan kualitas demokrasi bisa meningkat, sehingga menjadi jalan terciptanya kemakmuran dan kesejahteraan.

"Ini wujud kreativitas DPR menghadapi Revolusi Industri 4.0. Semua terkoneksi secara online dan serba digital. Dengan kemudahan teknologi, kita harapkan kualitas demokrasi akan meningkat, sehingga demokrasi benar-benar menjadi jalan bagi terciptanya kemakmuran dan kesejahteraan," kata Bamsoet.

Selain menjelaskan pencapaian program parlemen modern, dalam memperkuat transparansi

dan digitalisasi, Bamsuet juga memaparkan terobosan dan keberhasilannya memperbaiki citra DPR, semenjak dirinya menjalankan amanah sebagai Ketua DPR. Di antaranya adalah percepatan penyelesaian Rumusan Undang-undang (RUU) terorisme, dan penggantian Kitab UU Hukum Pidana Nasional (KUHP) yang lama.

"Program legislasi saya tingkatkan, RUU yang mengalami kemacetan kita urai dan carikan solusi. Hasilnya, RUU Terorisme yang sudah dua tahun tak kunjung selesai, dengan kerja keras bisa diselesaikan dan disahkan menjadi UU. Tidak lama lagi kita juga akan mempunyai Kitab UU Hukum Pidana Nasional yang baru, sebagai pengganti KUHP peninggalan Belanda," jelasnya.

Diketahui sebelumnya, citra DPR RI perlahan semakin membaik di mata publik. Ini terbukti dari hasil survei Charta Politika yang dilakukan beberapa waktu lalu. Sebanyak 49,3 persen responden menyatakan optimis terhadap Bamsuet.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sedang menata diri berupaya mewujudkan visinya, sebagai lembaga perwakilan rakyat yang modern dan berwibawa. DPR menginginkan adanya transparansi yang didukung oleh teknologi informasi dan diharapkan menjadi pusat pembelajaran serta pengetahuan demokrasi di Indonesia.

Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Anton Sihombing saat melakukan sosialisasi Renstra DPR 2014 - 2019, mengatakan perlunya penataan Lembaga Perwakilan Rakyat agar menjadi kuat untuk mewujudkan aspirasi rakyat yang diwakili. Menurutnya, Renstra ini adalah upaya dalam mewujudkan parlemen modern, salah satunya adalah gedung parlemen yang lebih representatif untuk melaksanakan tugas-tugas kedewanan.

"Gedung Parlemen adalah milik rakyat berarti kebebasan setiap orang bisa masuk, tetapi gedung parlemen terbebas bisa masuk adalah hanya di Indonesia Apakah perlu dibiarkan seperti ini tidak ditata. Seharusnya Gedung Parlemen merupakan sebuah icon yang bisa dikunjungi sebagai tempat

wisata demokrasi dari wisatawan dalam negeri maupun luar negeri," " katanya, usai mendengarkan masukan dari Pemerintah Provinsi Riau dan Akademisi, di Pekanbaru, Rabu (25/10/2017).

Hal lain seperti, kualitas dari Sumber Daya Manusia (SDM) pendukung dan kualitas dari Anggota DPR juga menjadi prioritas tercapainya tujuan Rentra ini. Namun ini tergantung dari Undang-Undang yang perlu dikaji kembali.

"Negara akan kuat, kalau DPR-nya kuat. Tidak ada negara yang kuat dengan DPR-nya yang tidak kuat. Jadi demokrasi Indonesia harus tetap kita jaga dan harus kita tata sebaik-baiknya untuk kemajuan bangsa dan negara." ujarnya.

Terkait dengan penilaian masyarakat mengenai citra Dewan berdasarkan target kinerja DPR, politisi partai Golkar ini menerimanya dan DPR senantiasa memperbaiki citra itu.

Lebih lanjut Anton menjelaskan, anggota DPR saat ini menempati ruangan yang dinilainya tidak pantas. Pemerintah diminta untuk menyiapkan Gedung Parlemen yang lebih layak.

"Di luar orang mengira yang membangun gedung DPR itu adalah anggota DPR, sebenarnya yang membangun itu adalah pemerintah. Pemerintah wajib memberikan fasilitas yang layak pada pejabat negara. Apakah layak kami dengan 1 anggota DPR beserta 7 orang tenaga ahli berada dalam ruangan 26 meter persegi. Jadi kebutuhan yang sangat mendasar," paparnya.

1.2 e-Parlemen

e-parlemen merupakan program pengembangan teknologi informasi dimana nantinya pimpinan dan anggota DPR RI akan mendapatkan pelayanan tersedianya data dan informasi bahan rapat paripurna secara digital yang akan mudah diakses menggunakan telepon genggam. Secara umum bentuk ini merupakan upaya penggunaan kertas (paperless) yang menciptakan efisiensi kerja.

Selain itu, program ini juga menjanjikan terwujudnya keterbukaan informasi publik yang selama ini digaungkan oleh pemerintah. Seluruh masyarakat nantinya dapat mengakses bahan-bahan

rapat persidangan paripurna dengan menggunakan
barcode atau share link.

BAGIAN 2

DPR dan e- Parlemen

Pertama kali diluncurkan pada Rabu, 29 Agustus 2018 silam, oleh Ketua DPR RI saat itu Bambang Soesatyo. Aplikasi DPR Now yang bisa diunduh melalui smartphone ini, merupakan salah satu perwujudan menuju parlemen modern. Dengan pemanfaatan kecanggihan teknologi digital, DPR RI bisa hadir di tengah-tengah rakyat. Aplikasi ini menampilkan aktivitas DPR dari Komisi I-XI juga menyaksikan dengan langsung kritik yang dilayangkan DPR RI terhadap pemerintah dalam rangka melakukan fungsi pengawasan. Melalui aplikasi DPR Now! berbagai program dan fungsi yang telah dijalankan oleh DPR RI bisa disosialisasikan dan diinformasikan kepada publik. Pun sebaliknya, publik bisa melihat setiap aktivitas dan denyut nadi kegiatan para wakil rakyatnya di DPR RI. Bahkan berbagai sidang maupun kegiatan kedewanan bisa dilihat secara real time di DPR Now!.

Hingga 31 Maret 2019, jumlah pengunduh aplikasi DPR Now! mencapai 9.435 user. Sedangkan

member yang melengkapi data diri menembus 1.115 member dengan rincian perempuan 900 akun (80,77 persen) dan laki-laki 215 akun (19,23 persen). Sama halnya seperti platform media sosial seperti Instagram, Facebook, maupun Twitter, pendaftar aplikasi DPR Now! juga diminta mengisi berbagai kelengkapan data diri. Hal ini agar memudahkan DPR RI dalam menindaklanjuti aduan yang disampaikan. Sehingga, terjalin komunikasi dua arah antara DPR RI dengan masyarakat dan sebaliknya. Berbagai aduan yang masuk ke aplikasi DPR Now! pada Maret 2019, paling banyak ditujukan kepada Komisi X DPR RI sebanyak 16 aduan. Disusul Komisi I, II dan III DPR RI dengan masing-masing 4 aduan.

Aplikasi DPR Now menemukan kanal aduan masyarakat terhadap berbagai persoalan. Dan di kanal lainnya ada laporan tindak lanjut aduan masyarakat.. Aduan tersebut dimasukkan ke komisi terkait DPR. Proses aduannya pun ada tiga tahap, yakni diterima, mulai proses, dan penyelesaian.



Program e-parlemen pertama kali mulai diterapkan dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2020-2021 di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

Parlemen kita sudah menerapkan e-parlemen, dimana semua dokumentasi dan dokumen pendukung sudah menggunakan IT (information technology) yang dibuat untuk memaksimalkan digitalisasi, dimana seluruh kerja DPR akan menjadi lebih cepat, efisien dan ekonomis yang bisa diterapkan seterusnya.

Konsep e-parlemen sebagai wujud akuntabilitas DPR RI kepada rakyat dengan mendukung seluruh kinerja Anggota Dewan agar lebih cepat, mudah dan akurat.

Nantinya DPR akan secara bertahap akan mengutamakan digitalisasi, sekaligus mengurangi penggunaan kertas dalam kegiatan sehari-hari.

E-parlemen merupakan model pengembangan teknologi informasi yang menyediakan data dan informasi bahan rapat secara digital dan mudah diakses menggunakan telepon genggam.

Selain menjanjikan terwujudnya keterbukaan informasi, e-parlemen juga merupakan bentuk upaya efisiensi penggunaan kertas dengan gagasan paperless office.

Parlemen modern ini tak cuma sekedar ditandai dengan kehadiran perangkat-perangkat teknologi saja. Akan tetapi harusnya menjadi sebuah paradigma berpikir parlemen dalam menjalankan pekerjaan. Sejauh ini kemajuan teknologi memang sudah mulai terlihat di parlemen, tetapi berbagai teknologi yang dihadirkan itu tak berdampak pada

membbaiknya kinerja parlemen. Kehadiran aplikasi DPR Now maupun aplikasi DPR lainnya tak memberikan warna berbeda pada DPR khususnya terkait dengan kinerja. Menurut Lucius, semuanya sama saja seperti dulu saat DPR masih lebih banyak menggunakan perangkat teknologi manual. Idealnya parlemen modern memberikan dampak positif pada kinerja DPR jika kehadiran teknologi selaras dengan perubahan pola pikir atau paradigma berpikir parlemen.

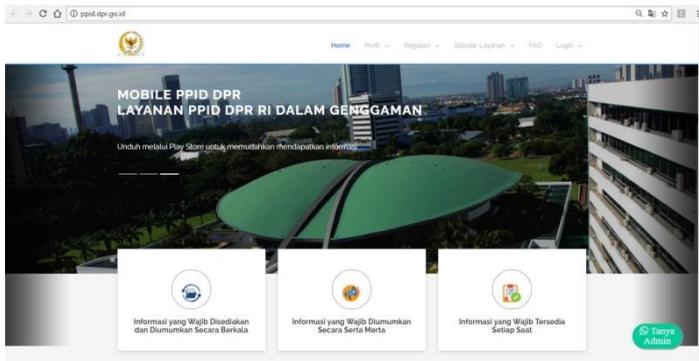
Menyoroti aplikasi DPR Now yang digunakan sebagai salah satu media komunikasi antara kegiatan kedewanan dengan masyarakat. Aplikasi tersebut dapat diunduh di telepon pintar atau smartphome.



Tangkapan gambar aplikasi DPR Now

Dalam laman resmi www.dpr.go.id juga ada mobile PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) DPR RI yang memuat layanan PPID dalam genggamannya. Ada tiga kanal pada layanan PPID, yakni Informasi Publik Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala, Informasi Publik Wajib Disediakan dan Diumumkan Serta Serta Merta, dan Informasi Publik Wajib Disediakan dan Diumumkan Setiap Saat. Informasi Publik Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala merupakan informasi

tentang profil DPR, seperti gambaran umum, profil pimpinan, tugas dan wewenang dan lainnya. Sedangkan Informasi Publik Wajib Disediakan dan Diumumkan Serta Merta disebut sebagai informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum. Dan terakhir Informasi Publik Wajib Disediakan dan Diumumkan Setiap Saat meliputi Daftar Informasi Publik dan informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan DPR RI.



Gambar salah satu layanan di laman www.dpr.go.id

BAGIAN 3

Tantangan menuju e-Parlemen

Konsep Parlemen modern pertama kali didengungkan dalam Konferensi Uni Eropa tentang “The Future of Democracy: Transition and Challenge in European Governance” pada tahun 1997. Selanjutnya Konsep Parlemen modern dimatangkan pada Tahun 2003, di Konferensi di Berlin, Jerman tentang “Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities.” Konsep ini diperkuat pada Tahun 2012 dengan menyerukan Declaration on Parliamentary Openness kepada seluruh parlemen dunia.

Konsep parlemen modern ini dimulai oleh Parlemen Inggris yang membuka akses informasi kepada publik. Mereka menggunakan teknologi informasi serta berkerjasama dengan media agar dapat lebih dekat dengan masyarakat dalam menjalankan fungsi representasinya. Parlemen Inggris menyadari pentingnya peran media dalam mengedukasi publik tentang kinerja dewan, peran dan fungsi dewan, bahkan keseharian para anggota parlemen. Menurut

Hansard Society, penggunaan teknologi dan adanya kerjasama dengan media memudahkan parlemen dalam memberikan akses informasi dan mengedukasi public.

Oleh sebab itu, representasi Anggota DPR RI akan lebih efektif bila dilakukan dengan cara memberikan informasi kepada rakyat mengenai proses, program kerja yang dilakukan parlemen melalui parlemen itu sendiri. Konsep Demokrasi Digital Menurut Fayakhun Andriadi, demokrasi digital hadir akibat adanya kemajuan teknologi digital dalam demokrasi. Bila dahulu ruang merujuk pada sesuatu yang bersifat fisik, di era digital, ruang juga bersifat maya. Masyarakat memanfaatkan ruang maya sebagai sarana partisipasi politiknya, istilahnya cyberspace politic (politik berbasis ruang maya). Partisipasi politik dalam ruang maya ini dapat dilakukan tanpa kehadiran fisik partisipan atau warga negara. Namun, warga negara tetap dapat mengekspresikan partisipasi politiknya secara maya melalui perangkat-perangkat digital.

BAGIAN 4

DASAR HUKUM

Regulasi

1. Declaration on Parliamentary Openness
2. Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia
3. International Civil Covenant on Political Relations
4. UU No. 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik
5. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
6. UU. No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
7. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
8. Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2010 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di DPR RI

9. Peraturan Komisi Informasi DPR RI No. 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik
10. Lampiran Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2010 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di DPR RI

BAGIAN 5

Inovasi Parlemen Menjawab Tantangan Zaman

Indonesian Parliamentary Center (IPC), dalam Reformasi Tata Kelola Informasi Publik di DPR RI menerangkan, keterbukaan DPR adalah mandat konstitusional. Anggota DPR dipilih melalui proses pemilihan umum. Pemilih memberikan mandat. DPR terpilih berkewajiban melaksanakan mandat tersebut dalam fungsi legislasi, pengawasan dan penganggaran. Perwujudan pelaksanaan mandat tersebut mungkin terjadi jika ada relasi yang berkesinambungan antara DPR dan Anggota DPR dengan masyarakat dalam melaksanakan fungsinya, atau yang biasa kita kenal dengan fungsi representasi. Fungsi representasi akan berjalan efektif dan berdampak jika DPR terbuka. Keterbukaan DPR meliputi dua hal, yaitu terbuka dalam pelaksanaan kegiatan dan persidangan dan terbuka dalam mempublikasikan dokumen.

DPR terbuka karena ada relasi pemberi-penerima mandat yang diberikan pada saat pemilihan umum. Relasi ini harus dijaga kesinambungannya

dalam pelaksanaan fungsi-fungsi DPR. Relasi biasa disebut sebagai relasi akuntabilitas. Ada proses pertanggungjawaban politik dari penerima mandat kepada pemberi mandat yang diberikan pada saat pemilu. Pemberi mandat menilai apakah kinerja DPR baik atau tidak. Dan dapat melakukan komplain jika merasa tidak puas. Sementara DPR sebagai penerima mandat merespon untuk memperbaikinya di masa yang akan datang.

Dalam kerangka akuntabilitas, transparansi merupakan langkah awal dari proses akuntabilitas. Bagaimana mungkin warga konstituen dapat turut berpartisipasi dalam proses kebijakan lalu berkontribusi positif terhadap kinerja wakil mereka jika tidak ada informasi mengenai para wakil yang terpilih, apa yang mereka lakukan dan bagaimana mereka melakukannya.

Mandat yang diberikan oleh rakyat kepada DPR diejawantahkan dalam fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi penganggaran. Sudah seharusnya pemilik sah kedaulatan memperoleh informasi proses dan hasil ketiga fungsi tersebut.

Dalam fungsi legislasi, DPR musti memastikan bahwa seluruh dokumen yang berkaitan dengan proses legislasi dipublikasikan. Mulai dari jadwal sidang, Naskah Akademik, Draf RUU, hasil-hasil rapat pembahasan, tim pembahasan hingga RUU yang disahkan. Demikian halnya pada fungsi penganggaran dan pengawasan. Tanpa adanya serangkaian informasi tersebut, maka peluang dialog antara DPR dengan konstituen dan partisipasi publik secara lebih luas tertutup.

Dalam fungsi anggaran, masih menurut IPC, proses penganggaran di DPR merupakan proses politik setelah melalui serangkaian proses teknokrasi. Keputusan dari seluruh proses tersebut ada di tangan pemerintah dan DPR. Apakah usulan pembangunan oleh masyarakat akan tepenuhi atau tidak, Pemerintah dan DPR yang menentukan. Karenanya, kewajiban membuka proses dimandatkan oleh UU supaya rakyat tahu mengapa usulan mereka tidak diakomodir. Sayangnya, yang terjadi sekarang dalam proses penganggaran di DPR seringkali mengabaikan prinsip keterbukaan sebagaimana yang diatur dalam proses

legislasi. Jarang sekali ditemukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang khusus diselenggarakan untuk pelaksanaan fungsi anggaran (IPC: 2015). Meskipun telah melalui serangkaian proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), namun konstituen perlu tahu dan memastikan bahwa usulan-usulan tersebut diakomodir dalam UU APBN dan ada alasan tertulis jika tidak diakomodir.

Fungsi Pengawasan melekat pada DPR secara kelembagaan. Komisi-komisi di DPR ditugasi untuk melaksanakan fungsi ini. Demikian halnya dengan Anggota DPR punya hak untuk pengawasan. Pasal di atas mengatur untuk pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap APBN, pemerintah wajib menyerahkan “bahan tertulis mengenai jenis belanja dan kegiatan” kepada Komisi dan dapat “diakses” oleh publik.

Pada dokumen Rencana Strategi DPR RI periode 2015-2019 disebutkan, fokus kegiatan yang dilakukan oleh DPR pada periode 2010-2014 tidak terlepas dari tugas konstitusional yang diamanatkan dalam undang-undang dasar 1945 yaitu fungsi

legislasi fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. rencana strategis atau Renstra DPR RI 2010-2014 merupakan dokumen yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan DPR RI untuk periode 5 tahun dari tahun 2010 sampai dengan 2014. Renstra ini ditetapkan dengan maksud memberi arah dan menjadi pedoman bagi segenap unsur yang ada di lingkungan DPR RI untuk menyusun rencana kerja dan rencana anggaran tahunan. pada praktiknya pelaksanaan seluruh kegiatan yang terdapat dalam dokumen Renstra tidaklah mudah karena setiap kegiatan yang direncanakan memiliki target penyelesaian yang harus dicapai dan terukur, sementara lembaga DPR merupakan lembaga politik yang sangat dinamis. oleh karena itu, setelah memasuki tahun kelima masih ditemukan berbagai persoalan dalam pelaksanaan Renstra DPR 2010-2014 terutama yang terkait dengan pencapaian target yang telah direncanakan.

Selanjutnya, rencana strategis DPR RI 2015-2019 disusun dalam rangka penyempurnaan terhadap berbagai upaya perencanaan yang telah dilakukan

sebelumnya. dokumen ini memadukan beberapa gagasan yang dihasilkan pada periode sebelumnya yang dinilai masih relevan dengan perkembangan tuntutan dan visi DPR RI periode 2015-2019. Hal utama yang ingin dicapai Renstra 2015-2019 dalam konteks perencanaan adalah bagaimana DPR RI pada 2015-2019 merencanakan program program reformasi kedewanan guna memperkuat kelembagaan DPR RI sebagai penyeimbang pemerintah melalui pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana yang diatur dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan lainnya serta menjadikan DPR sebagai lembaga yang modern dan dan merupakan perwujudan representasi rakyat. DPR yang modern selalu menjunjung aspek transparansi dan menggunakan teknologi informasi.

Istilah DPR yang modern, kemudian dipopulerkan Ketua DPR RI tahun 2018-2019 Bambang Soesatyo menjadi Parlemen Modern. Menurutnya, DPR Jaman Now sangat berbeda dengan DPR Jaman Old. DPR Jaman Now adalah parlemen yang menerapkan transparasi, teknologi informasi dan representasi. Seluruh kegiatan DPR dapat diakses

secara terbuka oleh masyarakat melalui aplikasi online. Dia yakin, dengan begitu, DPR RI tidak kalah dengan parlemen negara lain serta tertinggal perkembangan jaman. Berbagai perbaikan akan terus dilakukan untuk menuju Parlemen Modern sesuai dengan perkembangan dan kondisi Jaman Now.

DPR diharapkan dapat menjadi parlemen yang interaktif dengan konstituennya demi mendapatkan peningkatan dukungan public terhadap program program kerjanya. Dimana dalam prosesnya tentu diperlukan upaya yang berkesinambungan dari DPR untuk konsisten memberikan informasi secara langsung, akurat dan terpercaya kepada masyarakat.

Agar masyarakat dapat dengan mudah mengakses segala informasi dari dalam DPR. Hal ini penting karena masyarakat masa kini memiliki ekspektasi tinggi terhadap kinerja DPR.

Selama ini, belum semua produk maupun dinamika yang terjadi dalam DPR baik yang berupa hasil sidang, proses pembentukan Undang Undang, keputusan terkait kebijakan negara hingga perjanjian dengan negara lain, dapat secara cepat

terinformasikan kepada publik. Namun melalui parlemen modern setiap kegiatan di DPR dapat mulai diinformasikan kepada masyarakat umum secara luas. Termasuk semua agenda rapat kerja DPR termasuk kunjungan kerja baik kunjungan kenegaraan di dunia internasional.

Salah satu hal yang dapat dilakukan DPR untuk membuka informasi yang berkualitas dan transparan kepada masyarakat adalah dengan memaksimalkan situs web parlemen, seperti website dpr.go.id dan parlemenkita.org. Karena, sebagai lembaga yang menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran, maka setiap kegiatan DPR terkait dengan pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut akan menjadi daya tarik tersendiri dari website parlemen tersebut.

Melalui web tersebut, publik sebagai pengguna juga akan mendapatkan informasi yang benar, tepat, cepat dan lengkap dari sumber informasi utama.

Bukan informasi dari media lain yang mungkin tidak dapat menyajikan informasi secara

faktual, lengkap dan detail sebagaimana website resmi DPR.

Melalui keterbukaan akses publik ini rakyat jadi dapat mengetahui apa yang dilakukan para wakilnya di DPR. Masyarakat juga dapat turut mengawasi secara langsung bagaimana DPR bekerja dalam memperjuangkan aspirasi mereka. Karena, informasi mengenai kegiatan dewan akan selalu disiarkan secara langsung maupun dalam bentuk laporan kegiatan. Keberadaan website tersebut juga harus terus dipenuhi dengan informasi yang terus diperbaharui, serta mudah digunakan oleh masyarakat. Sehingga, konsep parlemen modern ini akhirnya dapat membuka akses yang seluasluasnya kepada publik untuk terlibat dalam proses pengambilan kebijakan.

Selain kedua situs tersebut, menurut Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah pemanfaatan sejumlah media online seperti akun media social twitter @DPR_RI juga harus turut dioptimalkan penggunaannya oleh anggota parlemen untuk memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada publik. Karena, akun media sosial dapat berfungsi

sebagai jembatan komunikasi antara anggota dan rakyat.

Dengan demikian, anggota DPR dapat menyebarkan informasi ke publik. Sementara public dapat memberi aspirasi secara langsung kepada anggota DPR. Anggota DPR dan masyarakat dapat langsung berdiskusi terkait berbagai permasalahan yang sedang dihadapi. Melalui interaksi semacam ini kepercayaan masyarakat terhadap DPR diharapkan dapat meningkat.

Dukungan teknologi informasi memang sudah seharusnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah parlemen modern. Melalui teknologi informasi ini anggota DPR dapat dengan mudah memberikan informasi mengenai proses, program kegiatan, dan program kerja yang dilakukan sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban kinerjanya kepada publik.

Demikian pula teknologi informasi secara virtual akhirnya dapat mendorong DPR untuk mengurangi penggunaan bahan-bahan kertas (paperless). Media perantara konvensional juga

diharapkan dapat diminimalisir untuk membudayakan pengurangan penggunaan kertas di DPR. Sebagai gantinya setiap anggota dewan didorong untuk lebih menggunakan komputer dan tablet dan membuka serta mempelajari bahan rapat melalui email mereka.

BAGIAN 6

KESIMPULAN

Berdasarkan fungsi yang dimilikinya, selama ini kinerja DPR dinilai belum memuaskan masyarakat. Berbagai lembaga riset menemukan rendahnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja DPR sejak DPR periode yang lalu. Oleh sebab itu, dalam rangka meningkatkan profesionalisme, kinerja, serta tanggungjawab DPR kepada masyarakat. DPR telah mengembangkan konsep baru yaitu konsep parlemen modern demi terciptanya DPR yang dapat berkinerja dengan lebih baik demi kepentingan masyarakat.

Membangun parlemen modern tentu membutuhkan waktu serta dukungan dari semua pihak, baik dari internal maupun eksternal DPR. Selain mengusung konsep pemanfaatan penggunaan teknologi informasi digital, seperti website dan sosial media yang langsung dikelola oleh DPR, DPR juga mempersiapkan peningkatkan fasilitas sarana dan prasarana DPR untuk mensukseskan parlemen modern ini. Dalam peningkatan kualitas SDM, Setjen DPR RI

terus berupaya melakukan pembenahan melalui reformasi birokrasi dan mempersiapkan badan keahlian sebagai supporting system para anggota DPR dari sisi substansi. DPR juga berencana untuk membangun Law Center, meningkatkan kualitas TV Parlemen, melakukan penataan kawasan Parlemen di lingkungan DPR RI dengan membuat taman Plaza Demokrasi, perbaikan museum parlemen dan peningkatan kapabilitas perpustakaan DPR.

DAFTAR PUSTAKA

- Iskandar, I. (2020). Kapabilitas Teknologi Informasi dan Komunikasi Sekretariat Jendral DPR RI Menuju Parlemen Modern. *Inovasi*, 17(2), 231-243.
- Pahlevi, I. (2015). DPR RI menuju parlemen modern. P3DI Setjen DPR RI dan Azza Grafika. Retrieved from <https://books.google.co.id/books?id=fasKkAEACAAJ>
- Sari, A. N. P., & Purbokusumo, Y. (2020). Parlemen Lokal di Era Digital. *PESIRAH: Jurnal Administrasi Publik*, 1(1), 59-76.
- Sanur, D. (2017). URGENSI MEMBANGUN PARLEMEN MODERN. *Kajian*, 20(4), 305-316.

Buku ini merupakan produk dari hasil penelitian yang di biaya oleh KemenristekBRIN yang terbit pada Tahun 2020. Buku ini secara ringkas menceritakan tentang : Inovasi Parlemen Menjawab Tantangan Zaman.

Buku ini disusun berdasarkan Hasil Penelitian Tesis Magister dengan Dana APBN Tahun 2020. Buku ini disusun oleh 2 orang penulis, penulis pertama yaitu : Mahendra Bungalan, SH Sebagai mahasiswa yang telah lulus dari Magister Ilmu Administrasi Pascasarjana - Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta. Penulis Kedua yaitu Dr. Retnowati WD Tuti, M.Si sebagai Dosen Pembimbing Tesis sekaligus Penyusun buku ini Bersama Mahendra Bungalan, SH. Dr Retnowati WD Tuti adalah Ketua Program Studi Magister Ilmu Administrasi FISIP UMJ, juga sebagai Peneliti di UMJ maupun KemenristekBRIN dalam berbagai masalah Pelayanan Publik dan Sosial Humaniora serta sebagai Reviewer Penelitian.

Penerbit :
UM Jakarta Press
Jln. KH Ahmad Dahlan – Cirendeu – Ciputat
Tangerang Selatan
Telp : 021-7492863
Email: umjakarta.press@gmail.com



ISBN 978-602-0798-82-0



